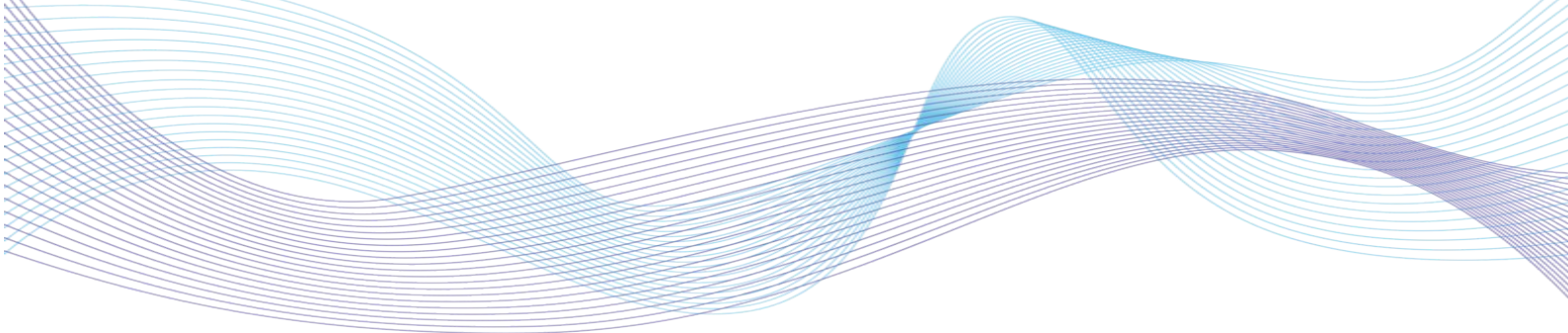




BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan ekonomis, atau dengan kata lain untuk mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus menyikapi hal tersebut dengan sungguh-sungguh agar penyediaan layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal sesuai dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi untuk Perumusan kebijakan teknis, Pelaksanaan kebijakan teknis, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis, Pelaksanaan administrasi, serta Pelaksanaan fungsi lain yang di erikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya di Bidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru harus berperan aktif dalam

mengambil inisiatif dalam koordinasi pelayanan sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi; (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2025-2029, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di

berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2025-2029. Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.

2.1 Dasar Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 ;
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ;
28. Peraturan Daerah Kota Banjarnaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ;
29. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.

3.1 Maksud dan Tujuan

3.1.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang (nama urusan) di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029, yaitu; **Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil dan Sejahtera)**.

3.2.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029, adalah: Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di

lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

4.1 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai mengenai latar belakang proses disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan

mengenai sumber daya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, Bagian ini juga mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif serta mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029.

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Pemuda Olahraga, Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas/Badan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda olahraga,

bidang budaya dan pariwisata serta pengendalian kesekretariatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan sub sektor bidang pemuda olahraga, bidang kebudayaan dan pariwisata. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Sekretariat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan program perencanaan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

- f. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan kepada Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemuda

Tugas pokok Bidang Pemuda adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, di bidang pembinaan pemuda dan remaja serta pengembangan Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemuda dan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan.
- b. Penyelenggaraan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan.
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Olahraga

Tugas pokok Bidang Olahraga adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, dibidang pembinaan pemuda dan remaja serta pengembangan olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Olahraga, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olah olahraga.
- c. Penyelenggaraan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebudayaan

Tugas pokok Bidang Kebudayaan adalah melaksanakan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerja sama kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
- c. Penyelenggaraan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan
- d. Pengendalian dan evaluasi pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pariwisata

Tugas Pokok Bidang Pariwisata adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
- c. Penyelenggaraan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru seperti yang tercantum Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, meliputi:

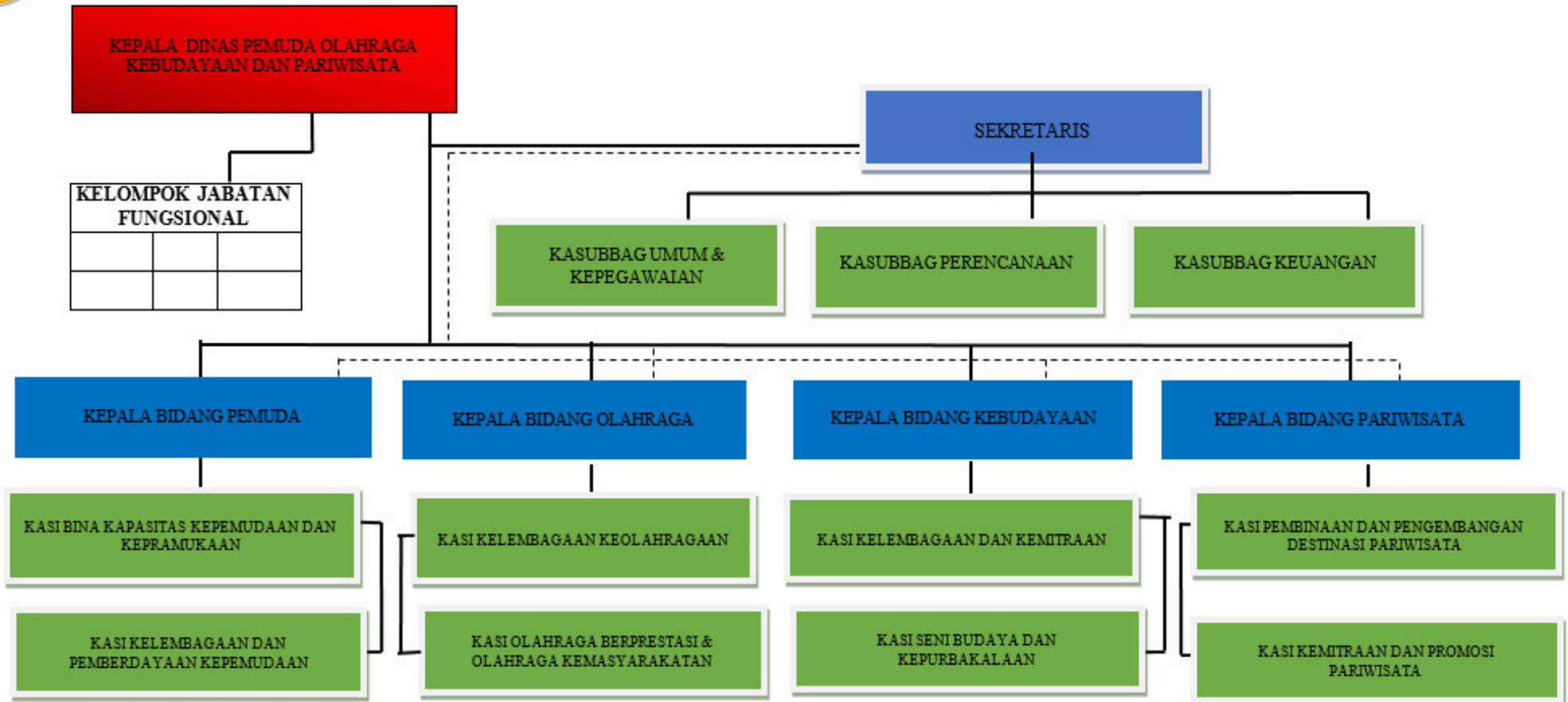
1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan;
2. Bidang Pemuda terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Kapasitas Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Kepemudaan.
3. Bidang Olahraga, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Keolahragaan;
 - b. Seksi Olahraga Berprestasi dan Olahraga Kemasyarakatan;
4. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 - b. Seksi Budaya dan Kepurbakalaan

5. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi Kemitraan dan promosi Pariwisata;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap, Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU



Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Disporabudpar Kota Banjarbaru (Disporabudpar 2025)

2.1.3 Sumber Daya manusia Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian sasaran strategis, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru memanfaatkan berbagai sumber daya yang menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan urusan Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan kinerja perangkat daerah.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan inovasi pembangunan daerah yang berfokus pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat penting untuk mendorong tata kelola perencanaan pembangunan yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah.

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru didukung oleh ASN dan Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

1. Daftar Jumlah Pegawai

UNIT KERJA/ BIDANG	ASN		JLH	NON ASN		JLH
	L	P		L	P	
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-
Sekretariat	4	5	9	4	9	13
Bidang Pemuda	3	1	4	4	4	8

Bidang Olahraga	5	1	6	7	4	11
Bidang Kebudayaan	4	2	6	4	4	8
Bidang Pariwisata	2	3	5	6	5	11
JUMLAH	18	13	31	25	26	51

Tabel 2.1 Daftar Jumlah Pegawai (Disporabudpar 2025)

2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	ASN		JLH	NON ASN		JLH
	L	P		L	P	
Sampai dengan SD	-	-	-	-	-	-
SLTP/ sederajat	-	-	-	-	-	-
SMA / sederajat	1	2	3	9	7	16
Diploma I, II / Akta I, II	-	-	-	-	-	-
Diploma III/Akta III	-	-	-	-	1	1
S1	15	9	24	15	18	33
S2	2	2	4	1	-	1
JUMLAH	18	13	31	25	26	51

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan (Disporabudpar 2025)

Sumber daya tersebut di atas merupakan satu kesatuan atau komponen dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Sumber daya manusia berjumlah 82 orang pegawai, yang berstatus ASN sebanyak 31 orang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 18 Orang dan pegawai perempuan sebanyak 13 orang yang terdistribusi pada sekretariat, dan bidang-bidang. Kemudian yang berstatus Non ASN/Honorer sebanyak 51 orang terdiri dari tenaga honorer laki-laki sebanyak 25 orang dan tenaga honorer perempuan sebanyak 26 orang juga terdistribusi pada sekretariat, dan bidang-bidang.

Secara keseluruhan, komposisi SDM Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mencerminkan struktur kelembagaan yang fungsional, tetapi masih memerlukan penguatan di aspek pelaksana administratif, khususnya pada beberapa bidang teknis. Untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan berbasis data ke depan, arah kebijakan pengembangan SDM perlu difokuskan

pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis dan pemanfaatan SDM dengan jenjang pendidikan tinggi (S2) dalam peran strategis lintas bidang.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah komponen vital yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun aksesibilitas, memiliki dampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pelaksanaan program kegiatan. Sarana mencakup berbagai peralatan kerja seperti komputer, jaringan internet, perangkat pendukung presentasi, dan kendaraan operasional, sementara prasarana mencakup gedung kantor, ruang kerja, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menciptakan lingkungan yang kondusif, penataan dan pemanfaatan sarana prasarana harus dilakukan secara optimal. Meskipun secara umum fasilitas telah tersedia, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, baik dalam hal kualitas maupun pemutakhiran teknologi, agar sesuai dengan kebutuhan kerja dan dinamika pengelolaan pembangunan daerah di masa depan. Berikut tabel sarana Prasarana yang ada di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata :

NO.	SPEISIPIKASI BARANG / NAMA JENIS BARANG	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH
TANAH					
1	Tanah Fasilitas Umum Perumahan	1			1
2	Tanah Bangunan Industri Alat Olah Raga	1			1
3	Tanah Bangunan Olah Raga	1			1
4	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	4			4
5	Tanah Untuk Monumen	1			1
PERALATAN DAN MESIN					
1	Pompa Air	2			2
2	Station Wagon	3			3
3	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1			1

4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2			2
5	Sepeda Motor	13		1	13
6	Lain-lain Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1			1
7	Monilog (Mobil Logistik/ Personil)	1			1
8	Mesin Gergaji	1			1
9	Toolkit Tukang Besi	2			2
10	Mesin Pompa air PMK	1			1
11	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	1			1
12	Global Positioning System	1			1
13	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	1			1
14	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	3			3
15	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2			2
16	Rak-Rak Penyimpan	1			1
17	Lemari Penyimpan	4			4
18	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2		1	2
19	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1			1
20	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	9			9
21	Mesin Absen (Time Recorder)	1			1
22	Lemari Besi/Metal	10			10
23	Lemari Kayu	8			8
24	Rak Kayu	1			1
25	Filing Cabinet Besi	19			19
26	Brandkas	2			2
27	Rotary Filing	2			2
28	Lemari Display	2			2
29	Lemari Kaca	5			5
30	Lemari Makan	1			1
31	CCTV - Camera Control Television System	1			1
32	Papan Visual/Papan Nama	9			9
33	Alat Penghancur Kertas	2			2
34	Display	2			2
35	LCD Projector/Infocus	6			6
36	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1			1
37	Papan Nama Instansi	3			3

38	Alat Kantor Lainnya	1			1
39	Meja Kerja Kayu	26			26
40	Kursi Besi/Metal	18			18
41	Kursi Kayu	14			14
42	Meja Rapat	2			2
43	Meja Resepsionis	2		1	2
44	Kursi Rapat	84		54	84
45	Kursi Tamu	2		2	2
46	Kursi Putar	25			25
47	Kursi Biasa	7			7
48	Bangku Tunggu	1			1
49	Kursi Lipat	60		3	60
50	Meja Komputer	3			3
51	Partisi	2			2
52	Sofa	7			7
53	Jam Elektronik	7			7
54	Mesin Pemotong Rumput	8			8
55	Alat Pembersih Lain-lain	5			5
56	Lemari Es	8			8
57	A.C. Split	1			1
58	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1			1
59	Kipas Angin	5		1	5
60	A.C. Unit	21			21
61	Treng Air/Tandon Air	10			10
62	Televisi	11			11
63	Amplifier	1			1
64	Loudspeaker	6			6
65	Sound System	35			35
66	Wireless	1			1
67	Megaphone	6			6
68	Microphone	2			2
69	Unit Power Supply	15			15
70	Alat Hiasan	1			1
71	Karpet	1			1
72	Gordyin/Kray	119			119
73	Tangga	1			1
74	Tempat Sampah Besar	2			2
75	Tombol Kebakaran/Alarm	1			1
76	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1			1
77	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4			4

78	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	37			37
79	Lain-lain Meja Kerja Pejabat	28			28
80	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2			2
81	Meja Operator	1			1
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1			1
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8		3	8
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3		1	3
85	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	101			101
86	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9			9
87	Buffet Kaca	2			2
88	Audio Distribution	1			1
89	Audio Filter	1			1
90	Microphone/Wireless MIC	6			6
91	Microphone/Boom Stand	2			2
92	Light Signal	5			5
93	Power Amplifier	3			3
94	Digital LED Running Text	3			3
95	Camera Electronic	2			2
96	Tripod Camera	1			1
97	Camera Film	1			1
98	Lensa Kamera	1			1
99	Servo Zoom Lens	1			1
100	Camera Digital	1			1
101	Kamera Stile	2			2
102	Peralatan Studio Video dan Film	1			1
103	Kamera Udara	1			1
104	Handy Talky (HT)	11			11
105	Facsimile	1			1
106	Wireless Amplifier	1			1
107	Kursi Dorong	2			2
108	Vacum Pump	4			4
109	Papan Bergerak	8			8
110	Alat Peraga Matematika	1			1
111	Gitar Elastrik	2		2	2
112	Shoot Gun	1			1
113	Komputer Wedis	4			4
114	P.C Unit	38			38
115	Lap Top	40	11	3	40
116	Note Book	2			2

117	Hard Disk	2			2
118	Monitor	1			1
119	Printer (Peralatan Personal Komputer)	80		13	80
120	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1			1
121	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	4			4
122	External/ Portable Hardisk	1			1
123	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	1			1
124	Tenda	6			6
125	Closed Circuit Television (CCTV)	1			1
126	Air Conditioning (AC)	3			3
127	Rambu Jalan	1			1
128	Alat Tenis Meja	1			1
129	Alat Badminton	1			1
130	Peralatan Permainan Lainnya	11			11
131	Matras	1			1
132	Peralatan Fitnes	13			13
133	Alat Olah Raga Lainnya	37			37
BANGUNAN DAN GEDUNG					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4			4
2	Bangunan Prasarana Gedung	3			3
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1			1
4	Gedung Instalasi Studio	1			1
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	4			4
6	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4			4
7	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	1			1
8	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	4			4
9	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	3			3
10	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	2			2
11	Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang	1			1
12	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2			2
13	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	5			5

14	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
15	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1			1
16	Bangunan Kolam/Bak Ikan	2			2
17	Bangunan Tempat Parkir	1			1
18	Bangunan Penerangan Taman	1			1
19	Baliho Berkonstruksi	1			1
20	Bangunan Toilet umum	5			5
21	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	3			3
22	Taman Permanen	3			3
23	Taman Semi Permanen	3			3
24	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	2			2
25	Tugu Pembangunan	1			1
26	Tugu Peringatan Lainnya	1			1
27	Pagar Permanen	3			3
28	Pintu Gerbang	2			2
BANGUNAN DAN GEDUNG					
1	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	2			2
2	Bangunan Got Miring	1			1
3	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku)	1			1
4	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang	1			1
5	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1			1
ASET TETAP LAINYA					
1	Alat Musik Tradisional/Daerah	10			10
2	Alat Musik Modern/Band	5			5
3	Pakaian Adat	25			25
4	Pakaian Adat Daerah	8			8
5	Aset Renovasi	1			1
6	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	3			3

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana (Disporabudpar 2025)

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam periode sebelumnya menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang pada umumnya tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan.

Disporabudpar secara konsisten memberikan dukungan teknis dalam urusan bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, semua ini berkontribusi pada pencapaian tujuan daerah. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dalam proses perencanaan juga menjadi lebih terstruktur, didukung oleh pemanfaatan sistem informasi dan data perencanaan yang semakin baik.

Capaian ini menjadi landasan yang penting untuk memperkuat peran Disporabudpar dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah di masa depan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporabudpar Kota Banjarbaru untuk periode Renstra 2025-2029 dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025					Rasio Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Peningkatan destinasi wisata unggulan	Persen	30	33	36	40	43	24	28	20	28	11.69	96.72%	24%	55%	90.03%	11.69%
2.	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	26.5	30	34	39	44	26.5	31.9	34	61	8.57	100%	106%	100%	98.12%	8.57%
3.	Persentase destinasi wisata yang memiliki Pokdarwis	Persen	43	-	-	-	-	48	-	-	-	-	112	-	-	-	-
4.	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	Persen	61	69	76	84	92	61	61	76	61	6	100%	87,5%	100%	73%	6%
5.	Persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	Persen	-	2	5	7	10	-	2	5	15	6	-	100%	100%	214%	6%
6.	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persen	35	-	-	-	-	35	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
7.	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	-	10	15	20	30	-	10	14,6	20	3.82	-	100%	97,3%	90.57 -	38.2
8.	Persentase partisipasi pemuda kegiatan ekonomi mandiri (wirausaha)	Persen	-	2	4	6	8	-	2	4	4.70		-	100%	100%		
9.	Persentase terlestarikannya cagar budaya	Persen	-	91.6	91.6	100	100	-	91.6	91.6	100	8.63	-	100%	100%	100%	8.63%
10.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	Persen	9	-	-	-	-	6	-	-	-	-	67%	-	-	-	-
11.	Persentase Pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitas seni budaya	Persen	-	37	46	65	83	-	37	46	65	23.26	-	100%	100%	90.97	23.26
12.	Jumlah cabang olah raga yang dibina	Buah	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
13.	Persentase cabang olahraga yang dibina	Persen	-	51	57	63	70	-	58.8	51	92.68	10.11	-	115%	89%	86.07%	10.11%

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporabudpar Kota Banjarbaru untuk periode Renstra 2021-2026

Capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam periode Renstra 2016–2021 hingga tahun berjalan menunjukkan hasil yang beragam berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Disporabudpar menunjukkan capaian positif. Sejalan dengan capaian kinerja pelayanan, efektivitas pencapaian indikator-indikator strategis juga sangat bergantung pada dukungan dana yang dialokasikan setiap tahunnya. Kinerja pendanaan mencerminkan seberapa mampu sumber pembiayaan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam perencanaan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja pendanaan menjadi krusial untuk menilai kecukupan, efisiensi, dan konsistensi alokasi anggaran dalam mencapai tujuan strategis setiap perangkat daerah.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, sebagai lembaga yang mendukung urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. memiliki kelompok sasaran layanan yang strategis dan luas. Layanan Disporabudpar tidak hanya mengutamakan kepentingan internal pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti Masyarakat, Pokdarwis, Organisasi dan instansi vertikal lainnya.

Layanan yang diberikan meliputi administrasi terkait urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Adanya kelompok sasaran layanan ini mencerminkan peranan penting Disporabudpar sebagai institusi yang melaksanakan promosi kebudayaan dan pariwisata, turut memajukan daerah dengan memfasilitasi dalam pencapaian prestasi pemuda dan olahraga. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kelompok sasaran layanan menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi layanan dan meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan di masa depan. Berikut adalah Kelompok sasaran layanan Disporabudpar dalam bentuk tabel:

No	Kelompok Sasaran	Jenis Layanan
1	Masyarakat Kota Banjarbaru	Pelayanan Administratif Mengenai Kepemudaan
	Organisasi Kepemudaan	
	Wirausaha Pemuda	
	Instansi Terkait	
2	Masyarakat Kota Banjarbaru	Pelayanan Administratif Mengenai Keolahragaan
	Organisasi Keolahragaan	
	Atlet dan Pelajar	
	Instansi Terkait	
3	Masyarakat Kota Banjarbaru	Pelayanan Administratif Mengenai Kebudayaan
	Dewan Kebudayaan	
	Dewan Kesenian	
	Lembaga Adat, Pelaku Seni, Sejarawan dan Pelaku Budaya lainnya	
	Instansi Terkait	
4	Masyarakat Kota Banjarbaru	Pelayanan Administratif Mengenai Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Pokdarwis	
	Pelaku dan SDM Pariwisata	
	Pelaku Usaha Pariwisata	
	Pelaku Ekonomi Kreatif	
	Instansi Terkait	

Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah (Disporabudpar 2025)

2.1.6 Mitra dan Kerjasama Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru bekerja sama dan melibatkan beberapa dinas teknis dan sebagainya seperti:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Banjarbaru dalam rangka Kerjasama Pembangunan strategis. Kerjasama ini diwakili oleh Dinas PUPRP Kota Banjarbaru sebagai *leading sector*, Kerjasama ini meliputi perlindungan Kawasan dan pengembangan wisata alam melalui peningkatan sarana prasarana wisata olahraga.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam rangka kerjasama pengelolaan sampah. Kerjasama ini meliputi perlindungan dan pemeliharaan kawasan bebas sampah melalui peningkatan kebersihan

pada kawasan destinasi wisata, wisata olahraga dan pada event pariwisata.

3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka kerjasama pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kerjasama ini meliputi pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada pajak hiburan, Restoran, Hotel dan Destinasi wisata olahraga.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Evaluasi ini sangat diperlukan sebagai fondasi dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah strategis ke depan. Permasalahan yang teridentifikasi tidak hanya terkait dengan aspek internal kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan kinerja perangkat daerah menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Berikut ini akan disajikan uraian mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru berdasarkan hasil evaluasi dan kajian selama periode sebelumnya. Berikut adalah tabel Permasalahan pelayanan Disbudporapar:

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Prestasi Olahraga	Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelatih	Target prestasi kurang maksimal/ Jumlah medali dan capaian prestasi menurun
			Kurangnya sarpras Olahraga
		Terbatasnya event kejuaraan yang di ikuti	Atlet tidak mampu bersaing di tingkat regional.

2	Belum optimalnya Daya Saing Kepemudaan	Prestasi Pemuda	Rendahnya Literasi dan Pengetahuan tentang Kewirausahaan
			Belum optimalnya Daya Saing berwirausaha
		Peran Organisasi Pemuda	minat dan keberanian pemuda memulai usaha masih rendah
		Daya saing wirausaha	Belum optimalnya pembinaan
			Adanya forum terpadu untuk mendorong percepatan penetapan
3	Belum optimalnya Penetapan cagar budaya belum dilaksanakan	Belum Optimalnya Penetapan Cagar budaya	Objek cagar budaya masih berstatus diduga
			Rentan terhadap Kerusakan atau Kehilangan cagar budaya
		Belum Optimalnya Objek Pemajuan Kebudayaan	Belum Optimalnya Pendataan
			Belum adanya regulasi pemajuan Kebudayaan
4	Belum optimalnya daya saing pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ketergantungan pada kunjungan lokal atau musiman	Belum optimalnya promosi pariwisata
			Belum Optimalnya Pengembangan daya tarik destinasi
			Belum optimalnya pemberdayaan Pokdarwis
		Kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi rendah.	Belum Optimalnya Pengembangan wisata MICE
		Daya saing produk	masih kurang nya

		rendah	pembinaan pelaku ekraf
			Belum adanya kelembagaan Ekraf

Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (Disporabudpar 2025)

Berdasarkan penilaian terhadap urusan pelayanan terkait Pemuda Olahraga kebudayaan dan pariwisata terdapat 5 (lima) masalah yang memengaruhi kinerja lembaga pemerintah daerah.

1. Belum Optimalnya Prestasi Olahraga

Pembinaan cabang olahraga prestasi hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hasil yang dicapai belum optimal. Meskipun potensi atlet sangat besar, mulai dari tingkat usia dini hingga profesional, namun pembinaan yang dilakukan belum terstruktur secara sistematis dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang menyebabkan pembinaan belum optimal antara lain tidak semua cabang olahraga memiliki fasilitas latihan yang cukup dan lengkap, Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelatih, serta Terbatasnya event kejuaraan yang diikuti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pembinaan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi pelatih, serta pemerataan fasilitas latihan harus menjadi prioritas. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, diharapkan pembinaan cabang olahraga prestasi dapat berjalan lebih efektif, sehingga Kota Banjarbaru mampu melahirkan atlet-atlet unggulan yang berdaya saing tinggi di tingkat daerah dan provinsi.

2. Belum Optimalnya Daya Saing Kepemudaan

Kemandirian pemuda dalam berwirausaha hingga saat ini masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Di tengah tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif dan terbatasnya lapangan pekerjaan, semangat kewirausahaan seharusnya menjadi salah satu alternatif bagi pemuda untuk mandiri secara ekonomi. Namun kenyataannya, minat dan keberanian pemuda untuk memulai usaha masih rendah serta masih rendahnya literasi

pengetahuan dan keterampilan dasar tentang kewirausahaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan terarah. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta perlu berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem wirausaha yang mendukung. Program pelatihan kewirausahaan yang aplikatif, pendampingan bisnis, menanamkan pola pikir kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko sejak usia muda menjadi kunci penting dalam membentuk jiwa wirausaha yang mandiri dan tangguh.

3. Belum optimalnya Pelestarian Kebudayaan

Penetapan cagar budaya di Kota Banjarbaru masih belum berjalan secara optimal. Banyak objek yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan arsitektur tinggi belum diidentifikasi atau ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelestarian kebudayaan antara lain keterbatasan data dan kajian akademik terhadap objek-objek potensial, kurangnya perlindungan terhadap warisan budaya yang seharusnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terpadu. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu melakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap objek-objek yang memiliki potensi sebagai cagar budaya serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pelestarian serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya juga harus diperkuat.

4. Belum Optimalnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah kunjungan wisatawan, baik dari dalam negeri (wisatawan Nusantara) maupun luar negeri (wisatawan mancanegara), masih belum mencapai tingkat yang optimal di berbagai daerah tujuan wisata di Banjarbaru. Padahal, sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, serta sarana promosi budaya. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka kunjungan antara lain

belum maksimalnya promosi destinasi wisata. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam mendukung iklim pariwisata yang ramah dan berkualitas juga masih perlu ditingkatkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi yang terpadu dan berkelanjutan, perlu meningkatkan promosi wisata melalui media digital, dan kerja sama dengan agen perjalanan. Penguatan infrastruktur serta peningkatan kapasitas SDM di sektor pariwisata termasuk pelatihan bagi pelaku usaha wisata local juga harus menjadi prioritas. Dengan pengelolaan yang terencana dan partisipatif, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara dapat meningkat secara signifikan, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ekonomi kreatif (ekraf) merupakan sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah melalui produk-produk berbasis kreativitas, budaya, dan teknologi. Namun, hingga saat ini promosi dan pembinaan terhadap pelaku usaha ekraf masih belum berjalan secara optimal. Banyak pelaku ekraf, terutama di tingkat UMKM dan lokal, masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses pasar, minimnya pemahaman tentang strategi pemasaran digital, dan kurangnya pendampingan usaha. Di sisi lain, upaya promosi oleh Disporabudpar pemerintah atau lembaga terkait masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam sebuah strategi pemasaran yang berkelanjutan dan berbasis data. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Disporabudpar perlu memperkuat program pembinaan melalui pelatihan teknis, manajerial, dan digital marketing yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, pengembangan platform promosi yang terintegrasi baik online maupun offline serta fasilitasi keikutsertaan dalam pameran lokal sangat penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Disporabudpar juga perlu mendorong terbentuknya

ekosistem ekraf yang kolaboratif dengan melibatkan komunitas kreatif, akademisi, pelaku usaha, dan sektor swasta.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarbaru agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Berikut adalah identifikasi isu strategis di perangkat daerah:

a. Isu Strategis RPJMD Kota Banjarbaru

Visi Wali Kota DAN Wakil Wali Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 adalah:

EMAS

Terwujudnya Banjarbaru Yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera,
dengan penjabaran :

ELOK

- keselamatan jiwa, perlindungan dari tindak kriminal, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sedangkan sehat menggambarkan kota yang mendukung gaya hidup sehat melalui infrastruktur layanan kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih, serta kualitas udara dan air yang baik. Secara keseluruhan, kata "ELOK" menjadi simbol dari sebuah kota yang tidak hanya layak huni, tetapi juga membanggakan, modern, dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Menjadikan Kota Banjarbaru yang estetik, nyaman, aman, dan sehat. kata elok mencerminkan aspirasi untuk mewujudkan kota yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga memiliki kualitas kehidupan yang tinggi bagi warganya. "Elok" mengandung makna keindahan yang luas, baik dari segi

estetika lingkungan, penataan ruang kota yang rapi dan menarik, hingga aspek kenyamanan yang mencakup kemudahan aksesibilitas, transportasi publik yang memadai, serta ruang terbuka hijau yang nyaman. Kota yang nyaman memiliki arti memberikan rasa tenteram bagi warganya dalam beraktivitas sehari-hari, bebas dari kemacetan, kebisingan, maupun masalah sosial. Sementara itu, aspek keamanan mencakup jaminan atas keselamatan jiwa, perlindungan dari tindak kriminal, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sedangkan sehat menggambarkan kota yang mendukung gaya hidup sehat melalui infrastruktur layanan kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih, serta kualitas udara dan air yang baik. Secara keseluruhan, kata "ELOK" menjadi simbol dari sebuah kota yang tidak hanya layak huni, tetapi juga membanggakan, modern, dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

MAJU

- Maju menggambarkan komitmen pemerintah untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam berbagai aspek, baik intelektual, keterampilan, maupun moral. SDM yang berkualitas dimaknai sebagai individu yang memiliki pendidikan memadai, sehat jasmani dan rohani, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemampuan untuk bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan global menjadi indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan kompetitif. Nilai inovatif tercermin dalam kemampuan warga Kota Banjarbaru untuk menciptakan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pembangunan, memanfaatkan teknologi, serta mendorong terciptanya wirausaha baru yang berdaya saing tinggi. Seluruh upaya tersebut selaras dengan upaya pembentukan karakter yang kuat dan akhlak mulia, sehingga pembangunan SDM tidak hanya menghasilkan

manusia cerdas dan terampil, tetapi juga bermoral, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

ADIL

- Adil mencerminkan tekad untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintahan yang berkeadilan mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang diberikan memegang teguh prinsip kesetaraan, transparan, dan bebas dari diskriminasi. Hal ini mencakup distribusi sumber daya yang merata, penegakan hukum yang tidak berpihak, serta proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan akuntabel. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas aturan, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat, seperti pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan.

SEJAHTERA

- Sejahtera mencerminkan tujuan utama dari setiap program pembangunan, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang layak, makmur, dan berkelanjutan. Kesejahteraan di sini tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, seperti meningkatnya pendapatan atau menurunnya Tingkat pengangguran, melainkan lebih dari itu, mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, perumahan yang layak, serta lingkungan yang bersih dan aman. Masyarakat yang sejahtera juga berarti hidup dalam kondisi sosial yang harmonis, memiliki ketahanan keluarga, serta peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama kelompok rentan dan miskin, guna memastikan tidak ada warga yang tertinggal.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk periode 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan infrastruktur berkualitas dan Pembangunan yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan SDM Kota Banjarbaru yang religious, bersosial dan berbudaya;
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan transparan;
4. Mewujudkan percepatan transformasi ekonomi

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya di bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan yang mendukung misi ke-2 (dua) yaitu “Mewujudkan SDM Kota Banjarbaru yang religious, bersosial dan berbudaya” dengan tujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia Banjarbaru yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing. Sedangkan pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata mendukung misi ke-4 (empat) “Mewujudkan percepatan transformasi ekonomi” dengan tujuan Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Menyejahterakan.

b. Isu Strategis Regional/Provinsi

Arah Kebijakan Pembangunan Kalimantan Selatan dengan Visi “Kalsel Bekerja Menuju Gerbang Logistik Kalimantan” didukung 5 misi yakni:

1. Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya, Dan Berakhlak Mulia;
2. Pembangunan Infrastruktur Yang Handal;
3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata Dan Syariah;
4. Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim;

5. Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah Dan Cepat.

Dimana Urusan Pemuda Olahraga dan Kebudayaan mendukung misi ke 1 (satu) yakni “Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya, Dan Berakhlak Mulia” dan urusan Pariwisata mendukung misi ke 3 (tiga) yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata Dan Syariah”.

1. **Daya saing sumber daya manusia (SDM) kepemudaan yang**

masih rendah. Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) kepemudaan di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang masih rendah merupakan tantangan pembangunan daerah. Hal ini umumnya tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalsel yang masih di bawah angka nasional, meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. IPP mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kepemudaan yang mencakup lima domain utama. Rendahnya daya saing ini mengindikasikan bahwa masih ada aspek-aspek penting dalam pengembangan kualitas pemuda yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, rendahnya daya saing ini menyoroti perlunya penguatan pada aspek kewirausahaan, kepemimpinan, dan peningkatan kualitas pendidikan yang relevan bagi pemuda Kalsel agar mereka dapat bersaing di pasar kerja global dan regional.

2. **Daya saing sumber daya manusia (SDM) keolahragaan**

masih rendah. Masalah daya saing SDM keolahragaan yang masih rendah di Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan salah satu isu strategis yang diidentifikasi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, khususnya dalam konteks peningkatan prestasi dan partisipasi di bidang olahraga. Rendahnya daya saing ini tidak hanya tercermin pada prestasi atlet, tetapi juga pada kualitas ekosistem keolahragaan secara keseluruhan, yang melibatkan tenaga pelatih, sarana, dan partisipasi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat, diharapkan SDM keolahragaan Kalsel, baik atlet maupun tenaga

pendukungnya, dapat memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional maupun internasional.

3. **Minimnya inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya, kurangnya perawatan situs bersejarah, serta belum maksimalnya pemanfaatan wisata Sejarah.** Fenomena minimnya inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya, kurangnya perawatan situs bersejarah, serta belum maksimalnya pemanfaatan wisata sejarah di Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah masalah kompleks yang saling berkaitan dan menghambat upaya pelestarian warisan budaya daerah. Inventarisasi dan dokumentasi adalah langkah awal yang sangat penting dalam upaya perlindungan cagar budaya (CB). Jika data dasar tidak lengkap, upaya perlindungan dan pemanfaatan akan terhambat. Perawatan yang tidak memadai mengakibatkan situs-situs bersejarah di Kalsel mengalami degradasi fisik, bahkan terancam punah. Pemanfaatan situs sejarah sebagai objek wisata adalah cara efektif untuk mendorong perawatan dan menumbuhkan kesadaran budaya, namun hal ini belum optimal. Solusi mendesak untuk masalah ini adalah mewujudkan sistem pelestarian yang sistemik dan melibatkan masyarakat dengan pendekatan ekonomi dan budaya, sehingga situs bersejarah dapat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari dan memiliki nilai tambah yang berkelanjutan.
4. **Modernisasi menggeser budaya lokal, kurangnya pewarisan budaya, serta minimnya promosi dan dokumentasi budaya khas daerah** Permasalahan modernisasi yang menggeser budaya lokal, kurangnya pewarisan, serta minimnya promosi dan dokumentasi merupakan tantangan serius bagi pelestarian **kebudayaan Banua dan kearifan lokal** di Kalimantan Selatan (Kalsel). Isu ini berpusat pada tiga aspek utama: perlindungan terhadap ancaman eksternal (modernisasi), keberlanjutan melalui generasi muda (pewarisan), dan penguatan identitas (promosi dan dokumentasi). Secara keseluruhan, tantangan ini memerlukan Rencana Induk Budaya Banua dan Kearifan Lokal

yang komprehensif, dengan strategi yang tidak hanya fokus pada pelestarian fisik tetapi juga pada revitalisasi nilai dan keterlibatan aktif generasi muda melalui pendekatan yang lebih modern dan adaptif.

5. Lonjakan wisatawan melebihi kapasitas daya tampung lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem.

Lonjakan jumlah wisatawan yang melebihi batas daya tampung lingkungan di suatu destinasi wisata alam, khususnya di Kalimantan Selatan yang kaya akan ekosistem hutan dan sungai, memang merupakan ancaman serius. Situasi ini dapat memicu kerusakan ekosistem yang signifikan, yang pada akhirnya akan merusak daya tarik wisata itu sendiri. Pengelolaan yang ketat terhadap daya tampung lingkungan adalah kunci agar lonjakan kunjungan dapat menghasilkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam Kalsel.

6. Terjadinya deforestasi dalam pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.

Terjadinya deforestasi (penggundulan hutan) dalam pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata adalah isu lingkungan yang dilematis. Hal ini menunjukkan adanya benturan antara tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek melalui pariwisata dan tuntutan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Di Kalimantan Selatan (Kalsel), yang memiliki kawasan hutan penting seperti Pegunungan Meratus (Geopark Meratus) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, deforestasi, meskipun didominasi oleh sektor tambang dan perkebunan, juga berpotensi terjadi dalam skala kecil hingga menengah untuk memfasilitasi pariwisata. Pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai alat untuk mengakses alam, bukan sebagai lisensi untuk menghancurkannya.

7. Meningkatnya kunjungan wisatawan dapat mempengaruhi ekosistem sekitar.

Meningkatnya kunjungan wisatawan memang memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekosistem sekitar, terutama pada destinasi yang berbasis alam

di Kalimantan Selatan (Kalsel). Jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan, peningkatan ini dapat menyebabkan kerusakan serius yang mengancam keunikan ekosistem itu sendiri. Tanpa penerapan batas daya tampung yang ketat, pariwisata yang awalnya bertujuan menyejahterakan dapat berubah menjadi bencana ekologis yang merusak aset utamanya.

c. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional adalah masalah-masalah fundamental yang memiliki dampak luas, mendalam, dan berjangka panjang terhadap pencapaian tujuan nasional, keberlanjutan pembangunan, serta posisi dan daya saing suatu negara di kancah global. Isu-isu ini bersifat mendesak untuk ditangani karena kegagalan dalam menyelesaikannya dapat menghambat kemajuan negara secara keseluruhan.

- 1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** adalah isu strategis nasional yang menjadi hambatan utama bagi pembangunan suatu daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Kualitas SDM yang rendah menciptakan tantangan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga tata kelola. Kualitas SDM tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan formal, tetapi juga mencakup kompetensi, kesehatan, dan etos kerja. Rendahnya kualitas SDM juga memiliki efek domino yang meluas terhadap semua upaya pembangunan daerah. Mengatasi masalah kualitas SDM memerlukan investasi besar di sektor pendidikan (vokasi), kesehatan (penanganan stunting), dan peningkatan kapasitas (pelatihan keterampilan) secara berkelanjutan.
- 2. Geopolitik dan Geoekonomi** adalah dua konsep kunci yang saling terkait, yang menjelaskan bagaimana geografi, sumber daya, dan lokasi suatu negara memengaruhi kekuatan, kebijakan luar negeri, dan hubungan ekonominya di panggung global. Geopolitik mempelajari bagaimana geografi (lokasi, topografi, iklim, sumber daya alam) memengaruhi politik, kekuasaan, dan hubungan internasional suatu negara. Geoekonomi adalah analisis mengenai bagaimana alat-alat

ekonomi (perdagangan, investasi, sanksi, bantuan) digunakan untuk mencapai tujuan geopolitik atau politik luar negeri. Di era modern, pertarungan antarnegara semakin banyak dilakukan melalui arena ekonomi (geoekonomi) daripada melalui konflik militer tradisional (geopolitik).

d. Isu Strategis Global

Isu strategis global adalah masalah-masalah yang melampaui batas-batas negara, memiliki dampak yang luas dan saling terkait di seluruh dunia, dan memerlukan kerja sama internasional untuk dapat diselesaikan. Isu-isu ini membentuk agenda kebijakan luar negeri, ekonomi, dan keamanan di hampir setiap negara. Berikut adalah isu-isu strategis global utama yang mendominasi diskusi saat ini:

- 1. Demografi global** merujuk pada studi statistik tentang populasi dunia dan bagaimana populasi tersebut berubah seiring waktu berdasarkan faktor-faktor utama seperti ukuran, struktur (usia dan jenis kelamin), pertumbuhan, dan distribusi geografis. Studi ini menganalisis tren kelahiran, kematian, dan migrasi, yang secara kolektif menentukan masa depan sosial, ekonomi, dan lingkungan global.
- 2. Ekonomi dan Bisnis** mencakup keseluruhan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa (**ekonomi**), serta aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk mencari keuntungan (**bisnis**). Kedua bidang ini adalah pendorong utama kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa.

e. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS bertujuan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam rencana pembangunan. Dalam sektor pariwisata, isu ini dapat dijabarkan melalui beberapa aspek yaitu : Pengembangan pariwisata belum didasarkan pada

analisis mendalam mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan tersebut. Infrastruktur pariwisata yang dibangun seringkali hanya berorientasi pada peningkatan akses, tanpa dibarengi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang memadai. Pengembangan pariwisata belum secara optimal memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, sehingga potensi ekonomi dan sosial belum maksimal. Strategi promosi dan pemasaran pariwisata cenderung fokus pada kuantitas kunjungan (*mass tourism*) alih-alih kualitas dan nilai edukasi (*ecotourism*). Isu ini menuntut perubahan paradigma dari pembangunan pariwisata demi keuntungan semata menjadi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, di mana kelestarian lingkungan dan sosial menjadi landasan utama perencanaan.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Usia pemuda 16-30 tahun	- Rendahnya literasi dan pengetahuan tentang kewirausahaan - Minat dan keberanian pemuda memulai usaha masih rendah	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata	Demografi Global	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Daya saing sumber daya manusia (SDM) kepemudaan yang masih rendah	Belum Optimalnya daya saing kepemudaan
2	Akomodasi dan sarana transportasi yang memadai	- Target prestasi kurang maksimal/ jumlah medali dan capaian prestasi menurun - Kurangnya sarpras olahraga - Atlet tidak mampu bersaing ditingkat regional				Daya saing sumber daya manusia (SDM) keolahragaan masih rendah	Belum optimalnya prestasi olahraga
3	Banyaknya struktur, Kawasan atau bangunan lama	- Objek cagar budaya masih berstatus diduga - Rentan terhadap kerusakan atau kehilangan cagar budaya - Belum optimalnya pendataan ODCB				Minimnya inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya, kurangnya perawatan situs bersejarah, serta belum maksimalnya pemanfaatan wisata sejarah	Belum optimalnya pelestarian Kebudayaan

	Banyaknya sanggar dan pelaku seni Budaya	Belum adanya regulasi pemajuan Kebudayaan				Modernisasi menggeser budaya lokal, kurangnya pewarisan budaya, serta minimnya promosi dan dokumentasi budaya khas daerah	Belum optimalnya pelestarian Kebudayaan
4	Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	• Belum optimalnya promosi pariwisata		Ekonomi Dan Bisnis (Economics & Business)	Geopolitik dan Geoekonomi	Lonjakan wisatawan melebihi kapasitas daya tampung lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem	Belum optimalnya daya saing pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		• Belum Optimalnya Pengembangan daya tarik destinasi				Terjadinya deforestasi dalam pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata	
		• Belum adanya kelembagaan Ekraf • Belum Optimalnya Pengembangan wisata MICE • masih kurang nya pembinaan pelaku ekraf • Belum optimalnya pemberdayaan Pokdarwis				Meningkatnya kunjungan wisatawan dapat mempengaruhi ekosistem sekitar	

Tabel 2.7 Isu Strategis (Disporabudpar 2025)

f. Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporbudpar) harus didasarkan pada analisis kesenjangan antara kondisi ideal yang ingin dicapai (visi/misi daerah) dan kondisi aktual yang ada di lapangan, dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan isu global. Berikut adalah kerangka penentuan isu strategis yang relevan untuk Disporbudpar, menggabungkan bidang tugas dinas tersebut dengan isu-isu yang telah Anda sebutkan sebelumnya:

1. Bidang Kepemudaan

Potensi usia produktif pemuda (16–30 tahun) belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan dan keberanian untuk berwirausaha. Rendahnya literasi serta pengetahuan kewirausahaan menjadi permasalahan utama. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan potensi pemuda belum optimal. Di tingkat global, fenomena demografi turut mempengaruhi arah kebijakan, sedangkan di tingkat nasional dan regional, kualitas serta daya saing sumber daya manusia (SDM) kepemudaan masih rendah. Oleh karena itu, isu strategis yang dihadapi adalah belum optimalnya daya saing kepemudaan.

2. Bidang Olahraga

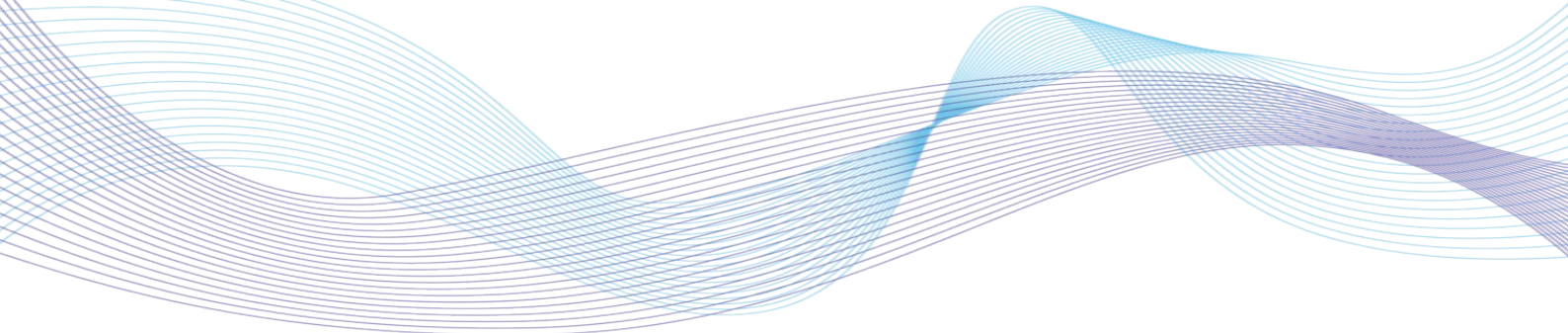
Meskipun sarana transportasi dan akomodasi memadai, target prestasi olahraga belum tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana olahraga serta minimnya daya saing atlet di tingkat regional. Dalam lingkup nasional dan regional, daya saing SDM keolahragaan juga dinilai masih rendah. Isu strategis yang muncul dari kondisi ini adalah belum optimalnya prestasi olahraga daerah

3. Bidang Kebudayaan

Banyaknya bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya yang belum terdokumentasi atau hanya berstatus dugaan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, risiko kerusakan dan kehilangan cagar budaya tinggi akibat minimnya upaya pelestarian dan pendataan ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya). Secara global, bidang kebudayaan juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan bisnis, sedangkan pada tingkat nasional dan regional, permasalahan muncul dari minimnya inventarisasi serta belum maksimalnya pemanfaatan wisata sejarah. Isu strategis utama di bidang ini adalah belum optimalnya pelestarian kebudayaan. Sementara itu, banyaknya sanggar dan pelaku seni budaya belum didukung oleh regulasi yang memadai dalam rangka pemajuan kebudayaan. Tantangan dari sisi modernisasi dan kurangnya dokumentasi budaya lokal menjadi faktor pendorong pentingnya penguatan regulasi dan promosi budaya daerah

4. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Potensi daya tarik wisata dan ekonomi kreatif belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain: belum optimalnya promosi pariwisata, pengembangan destinasi, kelembagaan ekonomi kreatif (ekraf), serta kurangnya pembinaan pelaku ekraf dan pemberdayaan Pokdarwis. Secara nasional, lonjakan wisatawan yang tidak diimbangi dengan kapasitas daya tampung lingkungan berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pariwisata berisiko menyebabkan deforestasi, sedangkan peningkatan kunjungan wisatawan juga berpotensi memengaruhi ekosistem lokal. Isu strategis dari bidang ini adalah belum optimalnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga diperlukan pendekatan strategis yang terintegrasi antara promosi, pengembangan SDM, dan pelestarian lingkungan



BAB III

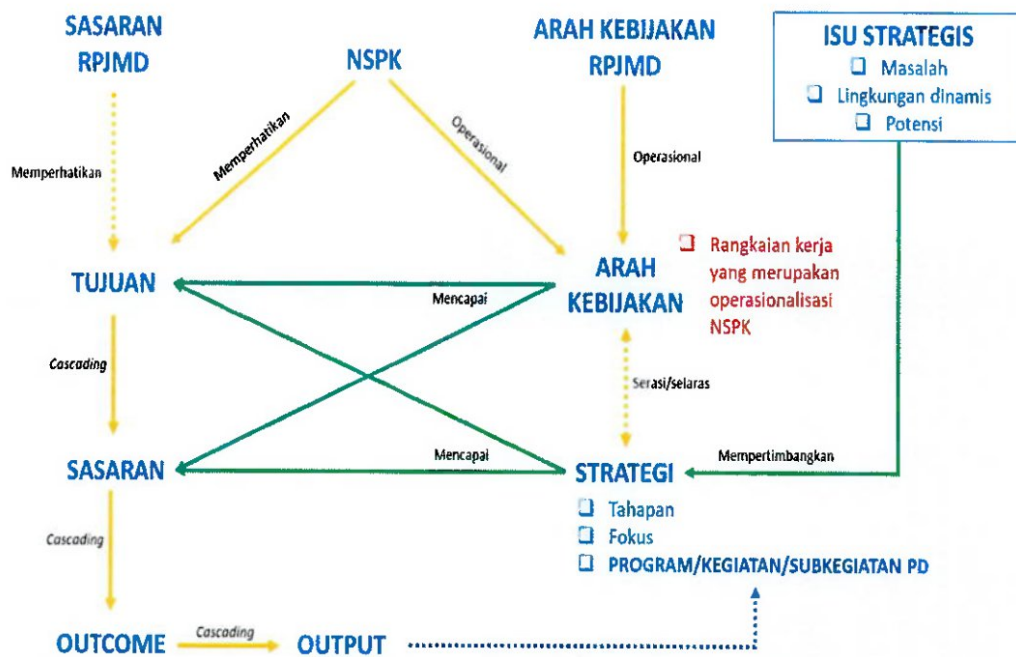
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

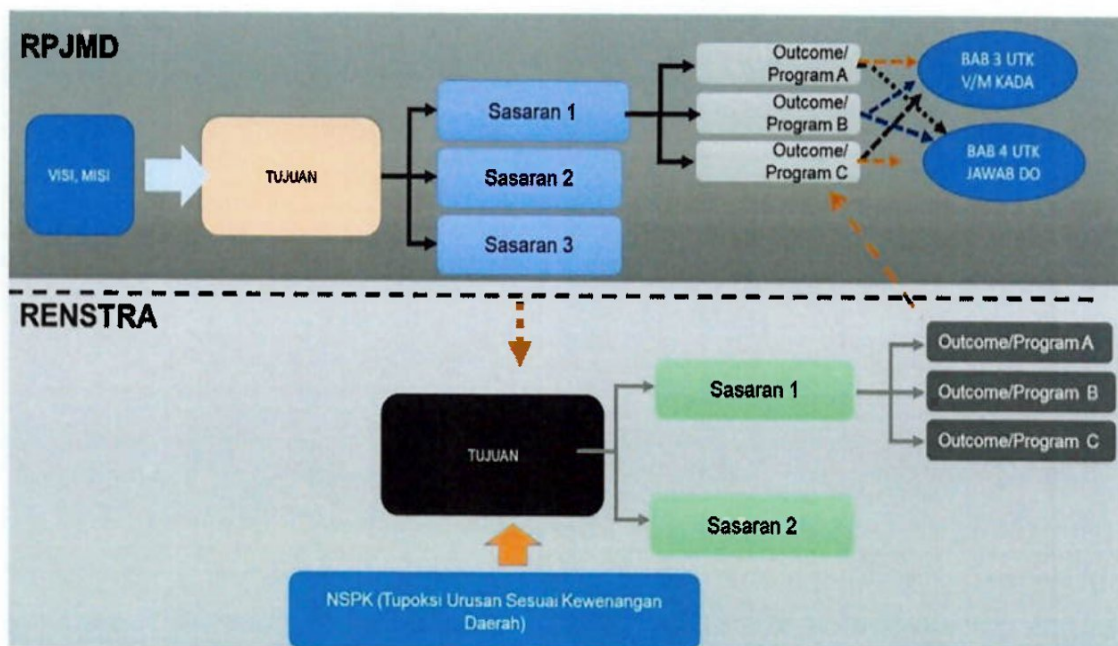
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 menjadi beban kerja dan tanggung jawab Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru adalah urusan pemerintahan mengenai Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang didasari pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tercantum pada misi 2 yaitu “Mewujudkan SDM Kota Banjarbaru yang religious, bersosial dan berbudaya”, dengan sasaran 1 yaitu “Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, misi 3 yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan transparan” dengan sasaran dan misi 4 yaitu “Mewujudkan percepatan transformasi ekonomi” dengan sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah”. Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :

**“MENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN OLAHRAGA,
BUDAYA DAN PARIWISATA DAERAH”**



3.1 Gambar Konsep Renstra PD



3.2 Gambar Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah atau organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Sasaran ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun sasaran tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah
2. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan t
3. Tugas dan fungsi perangkat daerah meningkatnya prestasi olahraga
4. Meningkatnya kemajuan warisan budaya
5. Meningkatnya daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif
6. Meningkatnya Akuntabilitas
7. Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA											
- Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Inklusif Berbasis Digital - Meningkatkan Produktivitas dan Keberdayaan Masyarakat - Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Jasa	Meningkatnya daya saing Olahraga, Pemuda, budaya dan pariwisata daerah yang inklusif		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir (Persentase)	5	5	6	7	8	10	12	
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi kepemudaan yg aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Wirausaha muda Aktif (%)	4	5	7	8	9	10	12	
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,30	71	72	72,50	73	74	75	
		Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Peningkatan perolehan medali olahraga tingkat provinsi (%)	5	10	12	15	17	19	20	
		Meningkatnya kemajuan warisan budaya	Persentase OPK yang dilestarikan (%)	5	10	20	30	40	50	50	
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	65	67	68	70	74	80	88	
		Meningkatnya daya tarik pariwisata dan ekraf	Persentase peningkatan kunjungan wisata (%)	2	2	2	3	3	5	5	
			Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya (%)	5	5	5	7	7	8	10	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,30	71	72	72,50	73	74	75	

Tabel 3.3 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan strategi yang tepat, terarah, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan daerah. Strategi perangkat daerah berfungsi sebagai kerangka yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman operasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul. Dengan menyusun strategi secara sistematis, Disporabudpar Kota Banjarbaru, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran kelembagaannya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta akuntabilitas kinerja yang tinggi. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Landasan Transformasi:	Akselerasi Pembangunan:	Peningkatan Daya Saing:	Pemantapan Daya Saing:	Perwujudan Komprehensif:
Pendataan Oranisasi Kepemudaan yang aktif dan Pemuda yang berwirausaha	Pembinaan Pemuda yang aktif berorganisasi dan pemuda yang berwirausaha mandiri	Pembinaan Pemuda berorganisasi dan pemuda yang berwirausaha	Peningkatan Penguatan Pemuda yang aktif berorganisasi dan pemuda yang berwirausaha mandiri	Monitoring dan Evaluasi Pemuda yang aktif berorganisasi dan pemuda yang berwirausaha
Peningkatan sarana prasarana olahraga untuk menunjang prestasi olahraga	Peningkatan pembinaan Atlet, Pelatih penunjang peningkatan prestasi olahraga	Penguatan kualitas Atlet, Pelatih dan Wasit	Penguatan Kualitas Atlet, Pelatih dan wasit tingkat Nasional	Perwujudan Kualitas Atlet, Pelatih dan wasit Daerah
Inventarisasi Kebudayaan benda dan tak benda	Pemeliharaan Objek pemajuan kebudayaan dan Cagar Budaya	Pembinaan dan Penguatan Pelaku Budaya dan Penyelamatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Kebudayaan Lokal	Pengembangan Kebudayaan lokal
Peningkatan Objek wisata, identifikasi potensi wisata unggulan, dan pelaku ekonomi Kreatif.	Pembinaan Pelaku Pariwisata, Pelaku UJP, dan pelaku ekonomi Kreatif.	Peningkatan Promosi Pariwisata, Event Pariwisata.	Peningkatan, Penguatan Prioritas Kawasan Strategis Pariwisata serta Promosi Pariwisata secara berkala dan efektif	Monitoring dan Evaluasi daya tarik Kawasan Strategis Pariwisata serta Promosi Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif

Tabel 3.4 Penahapan Renstra

Tabel di atas menggambarkan Strategi penahapan pembangunan dari tahun 2026 hingga 2030, yang disusun secara bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan lima tahunan. Setiap tahun difokuskan pada penguatan kapasitas pemuda, peningkatan kualitas olahraga, pelestarian budaya, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disporabudpar Kota Banjarbaru Tahun 2025–2029. Kebijakan ini tidak hanya dihasilkan sebagai tanggapan terhadap isu-isu strategis yang sebelumnya telah diidentifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan lebih fokus, sinergis, dan berorientasi pada hasil. Dalam menetapkan arah kebijakan ini, prinsip perencanaan berbasis bukti, keterpaduan lintas sektor, dan kesinambungan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah tabel Arah Kebijakan Perangkat Daerah :

Arah Kebijakan Renstra PD			
Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.	Mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai Pusat Pelestarian Cagar Budaya yang Berkelanjutan dan Partisipatif Meningkatkan Identitas Kesejahteraan Masyarakat	Penetapan Objek Cagar Budaya Kota banjarbaru	
		Pengembangan SDM melalui Pelatihan/sosialisasi Kesenian Tradisional	
		Pelestarian dan Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.	Menjadikan Kota Banjarbaru sebagai Destinasi Wisata Unggulan di Kalimantan	Penguatan Daya Saing Destinasi Wisata dan Promosi Pariwisata	

Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Selatan dengan Pendekatan Inovasi, Keberlanjutan, dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal.	Penguatan dan Peningkatan Pelaku Promosi Pariwisata Secara Berkelanjutan	
Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	Kota Banjarbaru menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan inklusif melalui inovasi, sinergi, dan pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata	
Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/ kota.		Peningkatan Investasi dan Kemitraan	
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku dan Pemasaran Produk	
		Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (HAKI)	

Tabel 3.5 Tabel Arah Kebijakan Perangkat Daerah

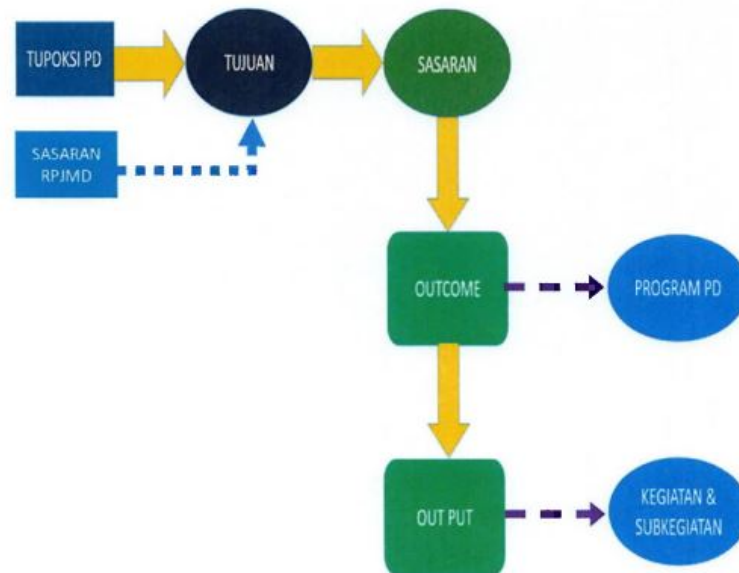
Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dirancang sebagai pengembangan langsung dari kebijakan RPJMD, yang berfokus pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, arah kebijakan yang dirumuskan berfokus pada penguatan sektor kebudayaan dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian budaya dan pengembangan destinasi wisata unggulan. keseluruhan arah kebijakan dalam tabel tersebut menggambarkan sinergi antara visi RPJMD dan operasionalisasi NSPK yang dijabarkan secara lebih teknis dalam Renstra PD, sehingga dapat menjadi panduan strategis bagi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam melaksanakan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sub bab ini menguraikan program yang direncanakan oleh Disporabudpar Kota Banjarbaru untuk tahun 2025–2029. Sebagaimana berdasarkan alur gambar dibawah ini:



Uraian ini merupakan hasil penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan terencana melalui metode yang dikenal sebagai cascading perencanaan. Metode ini menunjukkan hubungan yang logis antara tugas dan fungsi perangkat daerah dengan arah pembangunan wilayah yang tercermin dalam RPJMD.

Sebagaimana yang terlihat pada diagram alur, perencanaan strategis perangkat daerah dimulai dengan penjelasan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah, serta hubungannya dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru. Kedua elemen ini menjadi landasan untuk

merumuskan tujuan strategis Renstra, yaitu ungkapan umum mengenai arah dan kondisi masa depan yang ingin diraih oleh perangkat daerah.

Melalui alur ini, Disporabudpar Kota Banjarbaru memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar perencanaan yang kokoh, transparan, dan terhubung langsung dengan pencapaian tujuan. Selain itu, pendekatan ini memastikan bahwa perencanaan yang dibuat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menyelesaikan isu strategis dan masalah nyata yang ada di lapangan.

4.1 Uraian Program

Sebagai tindak lanjut atas perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Disporabudpar dalam dokumen Renstra ini, maka pada bab ini disajikan uraian lengkap mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi alat operasional dalam mencapai outcome pembangunan daerah di bidang pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata.

Penyusunan uraian program ini mengacu pada struktur urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kualifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terdapat 8 (delapan) program strategis yang ditetapkan dalam periode Renstra ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
7. Program Pemasaran Pariwisata
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					19.556.868.960,00		19.851.729.300,00		20.076.505.300,00		21.047.273.400,00		21.308.573.700,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.763.722.660,00		7.880.776.900,00		7.970.008.900,00		8.355.386.200,00		8.459.117.700,00	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	76	77	7.763.722.660,00	78	7.880.776.900,00	80	7.970.008.900,00	81	8.355.386.200,00	83	8.459.117.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.052.753.000,00		1.068.625.400,00		1.080.725.200,00		1.132.982.000,00		1.147.047.900,00	
Meningkatnya kapasitas kepemudaan	Persentase Lembaga Kepemudaan yang Aktif (%)	15	15	15	1.052.753.000,00	15	1.068.625.400,00	17	1.080.725.200,00	18	1.132.982.000,00	20	1.147.047.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					10.740.393.300,00		10.902.327.000,00		11.025.771.200,00		11.558.905.200,00		11.702.408.100,00	
Meningkatnya kapasitas keolahragaan	Persentase atlet yg dibina (%)	100	100	100	10.740.393.300,00	100	10.902.327.000,00	100	11.025.771.200,00	100	11.558.905.200,00	100	11.702.408.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase keikutsertaan dalam event kejuaraan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga		
	Persentase pelatih yang tersertifikasi (%)	10	10	11		12		13		13		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase sarpras olahraga yg sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.602.477.650,00		3.656.792.500,00		3.698.197.400,00		3.877.018.000,00		3.925.150.900,00	

2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.002.742.150,00		3.048.014.700,00		3.082.526.600,00		3.231.577.400,00		3.271.697.200,00	
Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan (%)	100	100	100	1.740.648.000,00	100	1.766.891.900,00	100	1.786.897.900,00	100	1.873.300.600,00	100	1.896.557.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya pengembangan kesejarahan	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan (%)	100	100	100	1.262.094.150,00	100	1.281.122.800,00	100	1.295.628.700,00	100	1.358.276.800,00	100	1.375.139.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					599.735.500,00		608.777.800,00		615.670.800,00		645.440.600,00		653.453.700,00	
Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	599.735.500,00	100	608.777.800,00	100	615.670.800,00	100	645.440.600,00	100	653.453.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2.648.895.300,00		2.688.832.900,00		2.719.277.800,00		2.850.764.300,00		2.886.156.300,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					809.970.300,00		822.182.300,00		831.491.600,00		871.697.100,00		882.519.200,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan sarana prasarana kawasan pariwisata (%)	45	45	46	809.970.300,00	47	822.182.300,00	48	831.491.600,00	49	871.697.100,00	50	882.519.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.588.125.900,00		1.612.070.200,00		1.630.323.200,00		1.709.155.000,00		1.730.374.000,00	
Meningkatnya promosi pariwisata	Jumlah kegiatan promosi pariwisata (Kegiatan)	5	5	7	1.588.125.900,00	8	1.612.070.200,00	9	1.630.323.200,00	10	1.709.155.000,00	11	1.730.374.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					250.799.100,00		254.580.400,00		257.463.000,00		269.912.200,00		273.263.100,00	
Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kompetensinya atau tersertifikasi (%)	20	20	20,3	250.799.100,00	22	254.580.400,00	24	257.463.000,00	27	269.912.200,00	30	273.263.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					25808241910.00		26197354700.00		26493980500.00		27775055700.00		28119880900.00	

Tabel 4.1 Uraian Program Perangkat Daerah

4.2 Uraian Kegiatan

Sub bab ini menyajikan uraian menyeluruh mengenai kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah di sektor pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Setiap kegiatan merupakan penjabaran langsung dari program yang telah ditetapkan, dan secara struktural menjadi jembatan antara kebijakan makro dengan pelaksanaan teknis operasional oleh perangkat daerah Terdapat sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan strategis yang ditetapkan dalam periode Renstra ini antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
9. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
12. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
13. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
14. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
15. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
16. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

17. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
18. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							
- Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Inklusif Berbasis Digital - Meningkatkan Produktivitas dan Keberdayaan Masyarakat - Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Jasa	Meningkatnya daya saing Olahraga, Pemuda, budaya dan pariwisata daerah yang inklusif				Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir (Persentase)		
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah			Persentase organisasi kepemudaan yg aktif (%)		
					Persentase Wirausaha muda Aktif (%)		
		Meningkatnya kapasitas kepemudaan			Persentase Lembaga Kepemudaan yang Aktif (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Meningkatnya pemuda yang mendapat Pelatihan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	

					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Meningkatnya Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	

			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya prestasi olahraga		Persentase Peningkatan perolehan medali olahraga tingkat provinsi (%)		
		Meningkatnya kapasitas keolahragaan	Persentase atlet yg dibina (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Persentase keikutsertaan dalam event kejuaraan (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Persentase pelatih yang tersertifikasi (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Persentase sarpras olahraga yg sesuai standar (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Cabor yang terfasilitasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
		Meningkatnya kejuaraan Olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pelatda)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	

					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	

				Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
				Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
				Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
	Meningkatnya daya tarik pariwisata dan ekraf			Persentase peningkatan kunjungan wisata (%)		
				Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya (%)		
		Meningkatnya promosi pariwisata		Jumlah kegiatan promosi pariwisata (Kegiatan)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Meningkatnya barang milik daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

					Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikelola dengan Baik	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Uraian Kegiatan Perangkat Daerah

4.3 Uraian Subkegiatan

Sub bab ini menyajikan pemaparan menyeluruh mengenai rancangan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disporabudpar selama periode lima tahun perencanaan, yaitu tahun 2025 hingga 2029. Sub kegiatan merupakan unit terkecil dalam struktur perencanaan yang bersifat operasional dan langsung berkaitan dengan capaian output tahunan yang terukur. Oleh karena itu, penyusunan dan pemilihan sub kegiatan dilakukan secara cermat, mempertimbangkan efektivitas pencapaian sasaran, efisiensi penggunaan anggaran, serta relevansinya terhadap arah pembangunan daerah. Terdapat 33 (sub kegiatan) yang mendukung pencapaian dalam periode Renstra ini antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
21. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
22. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
23. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
24. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
25. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
26. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
27. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
28. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
29. Pelindungan Cagar Budaya
30. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
31. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
32. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
33. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

Sedangkan untuk kinerja, indikator, dan pagu indikatif bisa kita lihat pada tabel dibawah ini

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				19.556.868.960,00		19.851.729.300,00		20.076.505.300,00		21.047.273.400,00		21.308.573.700,00		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.763.722.660,00		7.880.776.900,00		7.970.008.900,00		8.355.386.200,00		8.459.117.700,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	77	7.763.722.660,00	78	7.880.776.900,00	80	7.970.008.900,00	81	8.355.386.200,00	83	8.459.117.700,00	2.19.2.22.3.26. 01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.196.000,00		45.915.600,00		50.007.160,00		54.507.876,00		59.958.664,00		
Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	42.196.000,00	1	45.915.600,00	1	50.007.160,00	1	54.507.876,00	1	59.958.664,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				37.196.000,00		40.915.600,00		45.007.160,00		49.507.876,00		54.458.664,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	37.196.000,00	2	40.915.600,00	2	45.007.160,00	2	49.507.876,00	2	54.458.664,00		
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.19.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00		
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.067.833.560,00		5.133.690.728,00		5.167.371.767,00		5.253.411.554,00		5.283.617.166,00		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				19.556.868.960,00		19.851.729.300,00		20.076.505.300,00		21.047.273.400,00		21.308.573.700,00		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.763.722.660,00		7.880.776.900,00		7.970.008.900,00		8.355.386.200,00		8.459.117.700,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	77	7.763.722.660,00	78	7.880.776.900,00	80	7.970.008.900,00	81	8.355.386.200,00	83	8.459.117.700,00	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.196.000,00		45.915.600,00		50.007.160,00		54.507.876,00		59.958.664,00		
Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	42.196.000,00	1	45.915.600,00	1	50.007.160,00	1	54.507.876,00	1	59.958.664,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				37.196.000,00		40.915.600,00		45.007.160,00		49.507.876,00		54.458.664,00		

[illegible]

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		10		15		20		25			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		2		3		4		5			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		2		2		3		3			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)													
2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.19.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00	5	0,00		
2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				197.875.000,00		199.853.750,00		201.852.288,00		222.037.516,00		224.257.891,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	197.875.000,00	2	199.853.750,00	2	201.852.288,00	3	222.037.516,00	3	224.257.891,00		
2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				212.367.000,00		214.490.670,00		216.635.577,00		238.299.134,00		262.129.048,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	212.367.000,00	10	214.490.670,00	15	216.635.577,00	20	238.299.134,00	25	262.129.048,00		
2.19.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.19.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.19.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			0		0		0		0		0		

	Disediakan (Unit)													
2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				197.875.000,00		199.853.750,00		201.852.288,00		222.037.516,00		224.257.891,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	197.875.000,00	1	199.853.750,00	1	201.852.288,00	1	222.037.516,00	1	224.257.891,00		
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				382.733.000,00		386.560.330,00		397.788.833,00		437.567.717,00		441.943.394,00		
Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	2	382.733.000,00	2	386.560.330,00	2	397.788.833,00	3	437.567.717,00	3	441.943.394,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	4		4		5		5		6			
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				81.000.000,00		81.810.000,00		89.991.000,00		98.990.100,00		99.980.001,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	2	81.000.000,00	2	81.810.000,00	2	89.991.000,00	3	98.990.100,00	3	99.980.001,00		
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				301.733.000,00		304.750.330,00		307.797.833,00		338.577.617,00		341.963.393,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	4	301.733.000,00	4	304.750.330,00	5	307.797.833,00	5	338.577.617,00	6	341.963.393,00		
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				499.359.000,00		512.385.090,00		522.052.941,00		574.258.235,00		580.000.818,00		
Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikelola dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17	2	499.359.000,00	3	512.385.090,00	4	522.052.941,00	4	574.258.235,00	5	580.000.818,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	47		50		55		60		70			

	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	19		19		19		19		19			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)													
2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				49.989.000,00		50.488.890,00		55.537.779,00		61.091.557,00		61.702.472,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	49.989.000,00	1	50.488.890,00	1	55.537.779,00	1	61.091.557,00	1	61.702.472,00		
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.120.000,00		212.221.200,00		214.343.412,00		235.777.753,00		238.135.531,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	19	210.120.000,00	19	212.221.200,00	19	214.343.412,00	19	235.777.753,00	19	238.135.531,00		
2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.250.000,00		98.175.000,00		99.156.750,00		109.072.425,00		110.163.149,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	47	89.250.000,00	50	98.175.000,00	55	99.156.750,00	60	109.072.425,00	70	110.163.149,00		
2.19.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		

2.19.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000,00		75.750.000,00		76.507.500,00		84.158.250,00		84.999.833,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17	2	75.000.000,00	3	75.750.000,00	4	76.507.500,00	4	84.158.250,00	5	84.999.833,00		
2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000,00		75.750.000,00		76.507.500,00		84.158.250,00		84.999.833,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	75.000.000,00	1	75.750.000,00	1	76.507.500,00	1	84.158.250,00	1	84.999.833,00		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1.052.753.000,00		1.068.625.400,00		1.080.725.200,00		1.132.982.000,00		1.147.047.900,00		
Meningkatnya kapasitas kepemudaan	Persentase Lembaga Kepemudaan yang Aktif (%)	15	15	1.052.753.000,00	15	1.068.625.400,00	17	1.080.725.200,00	18	1.132.982.000,00	20	1.147.047.900,00	2.19.2.22.3.26. 01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				502.403.000,00		507.427.030,00		512.501.300,00		517.626.313,00		522.802.576,00		
Meningkatnya pemuda yang mendapat Pelatihan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)			502.403.000,00		507.427.030,00		512.501.300,00		517.626.313,00		522.802.576,00		

	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)													
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)													
	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)													
	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)													
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	60	90		120		160		200		250			
	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)													
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				502.403.000,00		507.427.030,00		512.501.300,00		517.626.313,00		522.802.576,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	60	90	502.403.000,00	120	507.427.030,00	160	512.501.300,00	200	517.626.313,00	250	522.802.576,00		

2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)			0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)			0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)			0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)			0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)			0		0		0		0		0		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.350.000,00		561.198.370,00		568.223.900,00		615.355.687,00		624.245.324,00		
Meningkatnya Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	32	32	550.350.000,00	32	561.198.370,00	33	568.223.900,00	35	615.355.687,00	37	624.245.324,00		

	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1		1		1		1		1			
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				550.350.000,00		561.198.370,00		568.223.900,00		615.355.687,00		624.245.324,00		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	32	32	550.350.000,00	32	561.198.370,00	33	568.223.900,00	35	615.355.687,00	37	624.245.324,00		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				10.740.393.300,00		10.902.327.000,00		11.025.771.200,00		11.558.905.200,00		11.702.408.100,00		
Meningkatnya kapasitas keolahragaan	Persentase sarpras olahraga yg sesuai standar (%)	100	100	10.740.393.300,00	100	10.902.327.000,00	100	11.025.771.200,00	100	11.558.905.200,00	100	11.702.408.100,00	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	Persentase keikutsertaan dalam event kejuaraan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase atlet yg dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelatih yang tersertifikasi (%)	10	11		12		13		13		15			
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3.273.454.700,00		3.306.189.247,00		3.405.374.924,00		3.575.643.671,00		3.611.400.107,00		
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Cabor yang terfasilitasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5	7	3.273.454.700,00	7	3.306.189.247,00	8	3.405.374.924,00	8	3.575.643.671,00	9	3.611.400.107,00		

2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				3.273.454.700,00		3.306.189.247,00		3.405.374.924,00		3.575.643.671,00		3.611.400.107,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5	7	3.273.454.700,00	7	3.306.189.247,00	8	3.405.374.924,00	8	3.575.643.671,00	9	3.611.400.107,00		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				764.530.000,00		772.175.300,00		779.897.053,00		787.696.024,00		795.572.984,00		
Meningkatnya kejuaraan Olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	120	150	764.530.000,00	170	772.175.300,00	190	779.897.053,00	220	787.696.024,00	250	795.572.984,00		
	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)													
	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	0	6		7		8		9		10			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				764.530.000,00		772.175.300,00		779.897.053,00		787.696.024,00		795.572.984,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	0	6	764.530.000,00	7	772.175.300,00	8	779.897.053,00	9	787.696.024,00	10	795.572.984,00		
2.19.03.2.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)			0		0		0		0		0		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	120	150	0,00	170	0,00	190	0,00	220	0,00	250	0,00		

	(Orang)													
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				5.405.193.900,00		5.513.775.606,00		5.514.208.336,00		5.790.711.214,00		5.849.132.376,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	120	150	5.405.193.900,00	170	5.513.775.606,00	180	5.514.208.336,00	200	5.790.711.214,00	250	5.849.132.376,00		
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	120	170		190		220		250		300			
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)													
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	0	70		80		100		120		150			
	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)													
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	120	170	0,00	190	0,00	220	0,00	250	0,00	300	0,00		
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	0	70	0,00	80	0,00	100	0,00	120	0,00	150	0,00		
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)			0		0		0		0		0		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				5.405.193.900,00		5.513.775.606,00		5.514.208.336,00		5.790.711.214,00		5.849.132.376,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang	120	150	5.405.193.900,00	170	5.513.775.606,00	180	5.514.208.336,00	200	5.790.711.214,00	250	5.849.132.376,00		

[illegible]

	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				999.970.000,00		1.009.969.700,00		1.020.069.397,00		1.071.072.867,00		1.092.494.324,00		
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	1	999.970.000,00	1	1.009.969.700,00	1	1.020.069.397,00	1	1.071.072.867,00	1	1.092.494.324,00		
2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				297.244.700,00		300.217.147,00		306.221.490,00		333.781.424,00		353.808.309,00		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2	2	297.244.700,00	2	300.217.147,00	2	306.221.490,00	2	333.781.424,00	2	353.808.309,00		
2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				0		0		0		0		0		
Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)			0		0		0		0		0		

2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.602.477.650,00		3.656.792.500,00		3.698.197.400,00		3.877.018.000,00		3.925.150.900,00		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				3.002.742.150,00		3.048.014.700,00		3.082.526.600,00		3.231.577.400,00		3.271.697.200,00		
Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan (%)	100	100	1.740.648.000,00	100	1.766.891.900,00	100	1.786.897.900,00	100	1.873.300.600,00	100	1.896.557.500,00	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.790.648.000,00		1.817.391.900,00		1.842.447.900,00		1.931.628.100,00		1.956.051.550,00		
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	80	250	1.740.648.000,00	250	1.766.891.900,00	250	1.786.897.900,00	300	1.873.300.600,00	350	1.896.557.500,00		
	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)													
	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)													
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)													
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				1.740.648.000,00		1.766.891.900,00		1.786.897.900,00		1.873.300.600,00		1.896.557.500,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	80	250	1.740.648.000,00	250	1.766.891.900,00	250	1.786.897.900,00	300	1.873.300.600,00	350	1.896.557.500,00		
2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)			0		0		0		0		0		
2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)			0		0		0		0		0		

Meningkatnya pengembangan kesejarahan	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan (%)	100	100	1.262.094.150,00	100	1.281.122.800,00	100	1.295.628.700,00	100	1.358.276.800,00	100	1.375.139.700,00		
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.790.648.000,00		1.817.391.900,00		1.842.447.900,00		1.931.628.100,00		1.956.051.550,00		
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	150	200	50.000.000,00	250	50.500.000,00	300	55.550.000,00	350	58.327.500,00	400	59.494.050,00		
	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	0	0		10		15		20		30			
	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	0	0		50		50		100		100			
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	150	200	0,00	250	0,00	300	0,00	350	0,00	400	0,00		
2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.500.000,00		55.550.000,00		58.327.500,00		59.494.050,00		
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.500.000,00	1	55.550.000,00	1	58.327.500,00	1	59.494.050,00		
2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	0	0	0,00	50	0,00	50	0,00	100	0,00	100	0,00		
2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	0	0	0,00	10	0,00	15	0,00	20	0,00	30	0,00		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.212.094.150,00		1.230.622.800,00		1.240.078.700,00		1.299.949.300,00		1.315.645.650,00		
Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	5	5	1.212.094.150,00	5	1.230.622.800,00	6	1.240.078.700,00	7	1.299.949.300,00	9	1.315.645.650,00		

	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	0	0		2		4		6		8			
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	7	8		9		9		10		12			
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				687.183.900,00		694.214.345,00		697.526.160,00		730.269.133,00		739.149.382,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	7	8	687.183.900,00	9	694.214.345,00	9	697.526.160,00	10	730.269.133,00	12	739.149.382,00		
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				474.910.250,00		484.408.455,00		489.252.540,00		513.715.167,00		518.852.318,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	5	5	474.910.250,00	5	484.408.455,00	6	489.252.540,00	7	513.715.167,00	9	518.852.318,00		
2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				50.000.000,00		52.000.000,00		53.300.000,00		55.965.000,00		57.643.950,00		
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	0	0	50.000.000,00	2	52.000.000,00	4	53.300.000,00	6	55.965.000,00	8	57.643.950,00		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				599.735.500,00		608.777.800,00		615.670.800,00		645.440.600,00		653.453.700,00		
Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	599.735.500,00	100	608.777.800,00	100	615.670.800,00	100	645.440.600,00	100	653.453.700,00	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya di Kota Banjarbaru				0		0		0		0		0		
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				599.735.500,00		608.777.800,00		615.670.800,00		645.440.600,00		653.453.700,00		

Meningkatnya Cagar budaya yang dikelola dengan baik	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	3	2	599.735.500,00	3	608.777.800,00	3	615.670.800,00	4	645.440.600,00	6	653.453.700,00		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2	8		8		8		8		9			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	0	2		2		3		5		8			
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				599.735.500,00		608.777.800,00		615.670.800,00		645.440.600,00		653.453.700,00		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	3	2	599.735.500,00	3	608.777.800,00	3	615.670.800,00	4	645.440.600,00	6	653.453.700,00		
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	9	0,00		
2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	0	2	0,00	2	0,00	3	0,00	5	0,00	8	0,00		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.648.895.300,00		2.688.832.900,00		2.719.277.800,00		2.850.764.300,00		2.886.156.300,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				809.970.300,00		822.182.300,00		831.491.600,00		871.697.100,00		882.519.200,00		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan sarana prasarana kawasan pariwisata (%)	45	46	809.970.300,00	47	822.182.300,00	48	831.491.600,00	49	871.697.100,00	50	882.519.200,00	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				809.970.300,00		822.182.300,00		831.491.600,00		871.697.100,00		882.519.200,00		
Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	2	5	809.970.300,00	7	822.182.300,00	8	831.491.600,00	10	871.697.100,00	12	882.519.200,00		
	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	60	60		90		120		150		180			

	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	8	10		12		15		17		20			
	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)													
3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				809.970.300,00		822.182.300,00		831.491.600,00		871.697.100,00		882.519.200,00		
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	8	10	809.970.300,00	12	822.182.300,00	15	831.491.600,00	17	871.697.100,00	20	882.519.200,00		
3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	2	5	0,00	7	0,00	8	0,00	10	0,00	12	0,00		
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	60	60	0,00	90	0,00	120	0,00	150	0,00	180	0,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.588.125.900,00		1.612.070.200,00		1.630.323.200,00		1.709.155.000,00		1.730.374.000,00		
Meningkatnya promosi pariwisata	Jumlah kegiatan promosi pariwisata (Kegiatan)	5	7	1.588.125.900,00	8	1.612.070.200,00	9	1.630.323.200,00	10	1.709.155.000,00	11	1.730.374.000,00	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.588.125.900,00		1.612.070.200,00		1.630.323.200,00		1.709.155.000,00		1.730.374.000,00		
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)			1.588.125.900,00		1.612.070.200,00		1.630.323.200,00		1.709.155.000,00		1.730.374.000,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	2		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)													
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2	3		5		5		6		6			
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1.588.125.900,00		1.612.070.200,00		1.630.323.200,00		1.709.155.000,00		1.730.374.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	2	1.588.125.900,00	3	1.612.070.200,00	3	1.630.323.200,00	3	1.709.155.000,00	3	1.730.374.000,00		
3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2	3	0,00	5	0,00	5	0,00	6	0,00	6	0,00		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)			0		0		0		0		0		

3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				250.799.100,00		254.580.400,00		257.463.000,00		269.912.200,00		273.263.100,00		
Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kompetensinya atau tersertifikasi (%)	20	20,3	250.799.100,00	22	254.580.400,00	24	257.463.000,00	27	269.912.200,00	30	273.263.100,00	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				250.799.100,00		254.580.400,00		257.463.000,00		269.912.200,00		273.263.100,00		
Meningkatnya Pelaksanaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	60	90	250.799.100,00	90	254.580.400,00	120	257.463.000,00	150	269.912.200,00	180	273.263.100,00		
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	60	90		90		90		90		120			
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		108.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	60	90	90.000.000,00	90	95.000.000,00	120	100.000.000,00	150	105.000.000,00	180	108.000.000,00		
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				160.799.100,00		159.580.400,00		157.463.000,00		164.912.200,00		165.263.100,00		
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	60	90	160.799.100,00	90	159.580.400,00	90	157.463.000,00	90	164.912.200,00	120	165.263.100,00		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				0		0		0		0		0		

Tabel 4.3 Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah

4.4 Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub bab ini menjelaskan tentang subkegiatan strategis yang dirancang oleh Dinas Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025–2029. Setiap subkegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi melalui proses perencanaan partisipatif serta analisis teknokratik.

Subkegiatan ini juga menggambarkan peran Dinas Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi teknis dalam urusan kepemudaan olahraga, kebudayaan, dan pariwisata, tetapi juga sebagai penggerak integrasi lintas sektor dengan memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki. Dengan demikian, pelaksanaan subkegiatan yang telah dipilih berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengonsolidasikan sumber daya dan memperkuat upaya pencapaian target pembangunan strategis daerah.

SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
1.	2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kapasitas kepemudaan	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	

			2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
3.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pengembangan kesejarahan	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
4.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
5.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	

Tabel 4.4 Uraian SubKegiatan yang mendukung Program Prioritas

Tabel di atas menunjukkan bagaimana Dinas Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara strategis untuk mendukung pencapaian program-program nasional dan lokal yang menjadi prioritas, terutama dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya dan meningkatkan daya saing daerah yang maju dan berkarakter. Program-program Prioritas Dinas Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata ditangani melalui program-program teknis Dinas Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata yang berfokus pada aspek peningkatan daya Tarik destinasi wisata dan ekonomi

kreatif, pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan peningkatan daya saing pada pemuda dan olahraga.

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang bersifat terukur dan relevan dengan mandat fungsi perangkat daerah. IKU disusun untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja strategis perangkat daerah dapat diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan selama periode perencanaan lima tahunan.

Adapun target kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut, yang memuat indikator kinerja utama serta target capaian tahunannya selama periode 2025–2029:

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	2	2	2	3	3	5	5	
3	Persentase Peningkatan perolehan medali olahraga tingkat provinsi	%	5	10	12	15	17	19	20	
4	Persentase organisasi kepemudaan yg aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya	%	5	5	5	7	7	8	10	
6	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	65	67	68	70	74	80	88	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama

Secara keseluruhan, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan adanya arah perbaikan terus-menerus dalam tata kelola pemerintahan daerah.

1. Persentase peningkatan kunjungan wisata

Ditargetkan meningkat secara bertahap dari 2% pada tahun 2025 hingga mencapai 5% pada tahun 2029 dan 2030. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan potensi destinasi wisata serta meningkatkan promosi pariwisata daerah.

2. Persentase peningkatan perolehan medali olahraga tingkat provinsi

Menunjukkan tren positif dengan target kenaikan dari 10% pada tahun 2025 menjadi 19% pada tahun 2029, dan 20% pada tahun 2030. Capaian ini diharapkan diperoleh melalui peningkatan kualitas pembinaan atlet dan penyediaan sarana serta prasarana olahraga yang memadai.

3. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

Dipertahankan pada angka 100% sepanjang periode perencanaan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan dan partisipasi aktif organisasi kepemudaan di Kota Banjarbaru.

4. Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya

Mengalami peningkatan dari 5% pada tahun 2025 menjadi 8% di tahun 2029 dan mencapai 10% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan arah kebijakan pemberdayaan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha serta perluasan akses pasar dan kemitraan.

5. Persentase cagar budaya yang dilestarikan

Juga menunjukkan tren positif, dengan target peningkatan dari 68% pada tahun 2025 hingga 84% pada tahun 2029, dan mencapai 88% pada tahun 2030. Capaian ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas lokal.

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan analisis terhadap dokumen perencanaan di tingkat nasional, regional, dan sektoral, serta peraturan yang mengatur penentuan indikator kinerja utama Dinas Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru memiliki IKK yang ditentukan dengan jelas oleh pemerintah pusat.

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	23,04	5	5	5	5	5	5	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Angka	31	2	2	3	3	3	5	
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-37	1	1	2	2	3	3	
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	21,3	21,5	22	22,5	23	23,5	24	
6	Persentase terlestarikannya cagar budaya	%	75	76	78	80	82	88	90	
7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	25,7	20	22	25	27	30	35	
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	
9	Tingkat Hunian Akomodasi	%	71,15	71,5	72	72	72,5	73	73	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

Secara keseluruhan, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan adanya arah perbaikan terus-menerus dalam tata kelola pemerintahan daerah.

1. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Indikator ini merupakan nilai yang didapat dengan mengolah data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru.

2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Indikator ini merupakan nilai yang didapat dengan mengolah data yang didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru.

3. Peningkatan Prestasi Olahraga

Sama halnya dengan IKU Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata pada indikator Jumlah medali Dari prestasi olahraga. Namun ada sedikit perbedaan dari definisi operational antara IKK dan IKU tersebut. Pada IKU capaian medali dihitung dari medali yang diperoleh pada Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional Dan Internasional. Sedangkan pada IKK capaian medali dihitung dari medali yang diperoleh pada Tingkat Nasional dan Internasional. Oleh karena itu ditetapkan target yang konsisten dari 2025 hingga 2030.

4. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan

Indikator ini memiliki rumus persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan. Yaitu dengan membandingkan jumlah wisatawan di tahun tersebut dengan jumlah wisatawan di tahun sebelumnya. Indikator ini memiliki kenaikan di tiap tahunnya dengan target 1% di tahun 2025 dan 3% di tahun 2030.

5. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Indikator ini mengukur seberapa banyak jumlah pemuda yang aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Kota Banjarbaru. Target pada indikator ini juga terus meningkat dari tahun 2025 sebesar 21.5% hingga pada tahun 2030 sebesar 24%.

6. Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya

Indikator ini mengukur seberapa besar cagar budaya yang berhasil melalui program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Terlestarikannya Cagar Budaya menunjukkan kenaikan target dari tahun 2025 sebanyak 75% dan 90% target pada tahun 2030.

7. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota

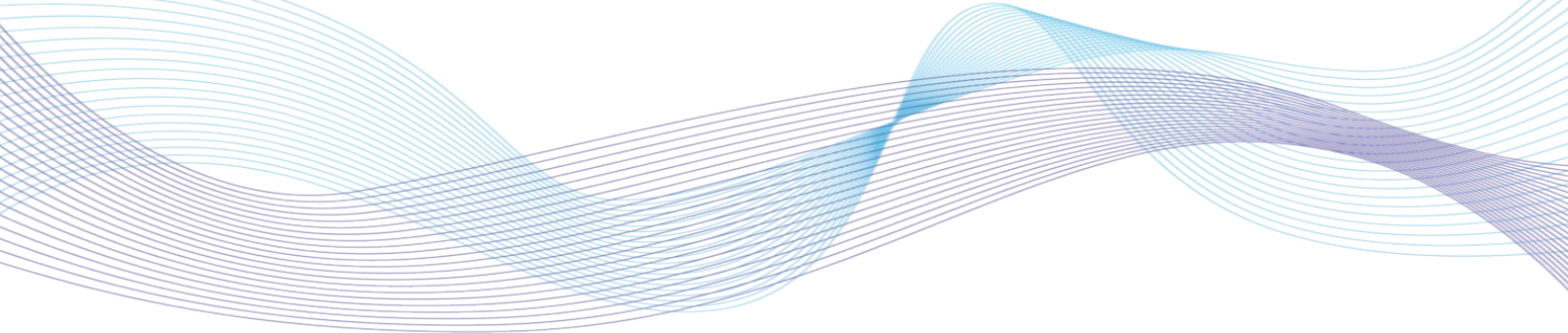
Indikator ini memiliki rumus persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Nusantara yang datang ke kabupaten/kota. Yaitu dengan membandingkan jumlah wisatawan di tahun tersebut dengan jumlah wisatawan di tahun sebelumnya. Indikator ini memiliki kenaikan di tiap tahunnya dengan target 25,7% di tahun 2025 dan 35% di tahun 2030.

8. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Indikator ini memiliki kesamaan formulasi dengan IKU Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Persentase Wirausaha Muda. Pada indikator ini capaian target memiliki kenaikan konsisten dari tahun 2025 sebanyak 4.7% dan 5.3% target pada tahun 2030 di akhir tahun periode renstra. Hal ini mungkin didukung dengan peningkatan pelatihan kewirausahaan pemuda yang terus bertambah setiap tahunnya.

9. Tingkat Hunian Akomodasi

Indikator ini memiliki rumus perhitungan yaitu membandingkan jumlah kamar yang terjual dan jumlah kamar yang tersedia. Indikator ini memiliki kenaikan di tiap tahunnya dengan target 71.5% di tahun 2025 dan 73% di tahun 2030. Indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah kunjungan wisata dan Tingkat hunian akomodasi yang cukup banyak namun tidak sebanding dengan Tingkat hunian yang terjual.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keselarasan arah pembangunan daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru. Renstra tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai panduan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam isi substansinya, Renstra mencakup visi dan misi Kepala Daerah yang diturunkan secara sistematis menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas untuk perangkat daerah. Keberadaan indikator kinerja utama yang dapat diukur dan target tahunan yang realistis berperan penting dalam menjamin akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah. Penyusunan dokumen ini juga mencerminkan integrasi dan kesinambungan antara dokumen perencanaan dari tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi sarana untuk mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra merujuk pada regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, Renstra juga berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses perumusan dilaksanakan secara partisipatif melalui forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan antar pemangku kepentingan.

Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala. Instrumen utama yang digunakan dalam proses ini adalah Rencana Kerja Tahunan (Renja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta evaluasi internal dan eksternal berbasis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pemanfaatan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) juga berperan penting dalam memperkuat sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029 Kota Banjarbaru dapat menjadi instrumen pengarah pembangunan yang efektif dan akuntabel, mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.